



## Efektivitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau

Wenny Friska<sup>1</sup>, Sufian Hamim<sup>2</sup>, Dia Meirina Suri<sup>3</sup>, Raden Imam Al Hafis<sup>4</sup>

Universitas Islam Riau, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [wenny\\_friska@yahoo.com](mailto:wenny_friska@yahoo.com), [sufianhamim@soc.uir.ac.id](mailto:sufianhamim@soc.uir.ac.id),  
[diameirinasuri@soc.uir.ac.id](mailto:diameirinasuri@soc.uir.ac.id), [imamalhafis@soc.uir.ac.id](mailto:imamalhafis@soc.uir.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of basic social rehabilitation for neglected persons with physical disabilities at the Technical Implementation Unit (UPT) for Empowerment of Persons with Physical Disabilities under the Social Service of Riau Province. The research focuses on understanding the implementation process of social rehabilitation, the forms of services provided, supporting and inhibiting factors, and the experiences of beneficiaries in participating in the rehabilitation program. This study employed a qualitative approach using a descriptive case study design. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation. The participants consisted of persons with physical disabilities who received rehabilitation services, social workers, instructors, psychologists, and related staff at the UPT. The findings reveal that the social rehabilitation program has been implemented through physical guidance, mental and spiritual guidance, psychosocial assistance, and vocational skills training. The program contributed positively to increasing beneficiaries' self-confidence, social interaction, and motivation toward independent living. However, the effectiveness of the rehabilitation process is still constrained by limited professional human resources, inadequate facilities and infrastructure, and persistent social stigma toward persons with disabilities. The study also found that social rehabilitation is not merely a form of social assistance but a process of empowerment that emphasizes psychosocial recovery and social reintegration. This study contributes to strengthening the understanding of empowerment-based social rehabilitation for persons with disabilities. Practically, the findings can serve as an evaluation material for improving rehabilitation services and disability-inclusive social policies. Further research is recommended to examine post-rehabilitation sustainability and comparative rehabilitation practices in other regions.*

**Keywords:** Social rehabilitation, persons with disabilities, social empowerment, neglected disability, social welfare

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas fisik yang terabaikan di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik di bawah Dinas Sosial Provinsi Riau. Penelitian ini berfokus pada pemahaman proses implementasi rehabilitasi sosial, bentuk layanan yang diberikan, faktor pendukung dan penghambat, serta pengalaman penerima manfaat dalam berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui*

---

*wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Partisipan terdiri dari penyandang disabilitas fisik yang menerima layanan rehabilitasi, pekerja sosial, instruktur, psikolog, dan staf terkait di UPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial telah diimplementasikan melalui bimbingan fisik, bimbingan mental dan spiritual, bantuan psikososial, dan pelatihan keterampilan kejuruan. Program ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepercayaan diri, interaksi sosial, dan motivasi penerima manfaat menuju kemandirian hidup. Namun, efektivitas proses rehabilitasi masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia profesional, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, dan stigma sosial yang masih ada terhadap penyandang disabilitas. Studi ini juga menemukan bahwa rehabilitasi sosial bukan hanya bentuk bantuan sosial tetapi juga proses pemberdayaan yang menekankan pemulihan psikososial dan reintegrasi sosial. Studi ini berkontribusi untuk memperkuat pemahaman tentang rehabilitasi sosial berbasis pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Secara praktis, temuan ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan rehabilitasi dan kebijakan sosial inklusif disabilitas. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk meneliti keberlanjutan pasca-rehabilitasi dan praktik rehabilitasi komparatif di wilayah lain.*

**Kata Kunci:** *Rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas, pemberdayaan sosial, disabilitas yang terabaikan, kesejahteraan sosial.*

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai bentuk eksklusi sosial, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, hingga layanan sosial dasar, baik dalam konteks global maupun nasional. Dalam banyak negara, kebijakan rehabilitasi sosial telah dikembangkan sebagai upaya untuk memulihkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Di Indonesia, penyandang disabilitas secara eksplisit diakui sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, namun beragam laporan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan (Alfarabbi & Indarto, 2024)

Penyandang disabilitas daksa diartikan sebagai mereka yang mengalami gangguan pada fungsi fisik merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan, marginalisasi, dan ketergantungan, sehingga membutuhkan dukungan rehabilitasi sosial yang terencana dan berkelanjutan. Secara global, perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas semakin meningkat sejak lahirnya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat, partisipasi sosial, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (Sari & Museliza, 2023). Namun, dalam praktiknya, kelompok disabilitas masih menjadi salah satu kelompok rentan yang menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan sosial, seperti keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga pelayanan sosial dasar. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika penyandang disabilitas berada dalam situasi terlantar sehingga membutuhkan intervensi rehabilitasi sosial yang komprehensif dari negara

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dan pemerintah daerah menyelenggarakan berbagai program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang bertujuan memfasilitasi kemandirian, partisipasi sosial, dan peningkatan kualitas hidup. Rehabilitasi sosial tidak hanya dimaknai sebagai pemberian layanan fisik atau medis, tetapi juga mencakup intervensi psikososial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan sosial yang berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan, kompetensi tenaga profesional, dukungan keluarga dan komunitas, serta ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Namun demikian, efektivitas program sering kali berbeda antar daerah, terutama ketika menyangkut kelompok penyandang disabilitas terlantar yang memiliki kompleksitas permasalahan lebih tinggi. (Erlinawidyaningrum, 2019)

Di Indonesia, perhatian terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui program rehabilitasi sosial dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui dinas sosial dan unit pelaksana teknis. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial sering kali belum berjalan optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, kurangnya tenaga profesional, serta belum maksimalnya program pendampingan sosial. Penelitian mengenai efektivitas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi telah berjalan, tetapi masih mengalami hambatan pada aspek pendampingan dan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, penelitian di UPT RSBD Pasuruan menemukan bahwa program rehabilitasi sosial mampu meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala dalam pemerataan layanan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas (Anggraeni et al., 2025).

Rehabilitasi sosial dasar bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial individu, meningkatkan kemandirian, serta membantu penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Meski demikian, implementasi kebijakan rehabilitasi sosial di berbagai daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat (Paramesti & Yuliani, 2024). Fenomena tersebut juga terlihat di Provinsi Riau, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau yang memiliki tugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar. Keberadaan UPT ini menjadi sangat penting karena masih banyak penyandang disabilitas daksa yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi rendah, mengalami keterbatasan akses pelayanan, serta bergantung pada bantuan keluarga maupun pemerintah. Secara ideal, program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, meningkatkan keterampilan, membangun

kemandirian, serta mendorong penerima manfaat untuk kembali berfungsi secara sosial di keluarga dan masyarakat. Namun, efektivitas program tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan kegiatan, tetapi juga harus dianalisis dari ketercapaian tujuan, ketepatan sasaran, kecukupan sumber daya, proses pelayanan, serta hasil yang dirasakan oleh penerima manfaat (Edi Sutrisno, 2010). Oleh karena itu, data awal mengenai pelaksanaan program menjadi penting untuk melihat gambaran awal efektivitas program di UPT PPDD Dinas Sosial Provinsi Riau.

Tabel 1 Data Tenaga Pekerja Sosial dan Tenaga Pendamping UPT PPDD

No	Jenis Tenaga	Jumlah (Oran
1	Pekerja Sosial Ahli Muda	1
2	Peksos Profesional	1
3	Tenaga Perawat	4
4	Dokter	1
5	Psikolog	1
6	Penerjemah Bahasa	1
7	Pembimbing Sosial	1
8	Pembimbing Agama	1
	Jumlah	11

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah tenaga pelayanan di UPT PPDD adalah 11 orang. Dari jumlah tersebut, tenaga pekerja sosial inti terdiri atas 1 orang Pekerja Sosial Ahli Muda dan 1 orang Peksos Profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar masih bertumpu pada jumlah pekerja sosial yang terbatas, sementara penerima manfaat membutuhkan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi awal, pada UPT PPDD memiliki sejumlah tenaga pelayanan yang mendukung proses rehabilitasi sosial dasar. Dalam realitas lapangan, pelayanan rehabilitasi sosial tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga menyangkut pemulihan psikososial, peningkatan keterampilan, dan proses pemberdayaan agar penyandang disabilitas dapat hidup lebih mandiri.

Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi sosial dasar masih menjadi persoalan yang perlu dikaji secara mendalam. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial sering kali belum berjalan optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, kurangnya tenaga profesional, serta belum maksimalnya program pendampingan sosial.

Tabel 2. Jenis Reabilitas Sosial

No	Jenis Rehabilitasi Sosial/Bimbingan
1	Bimbingan fisik (senam)
2	Bimbingan kerohanian dan mental (pengajian)
3	Bimbingan sosial dan psikososial (wirausa dan kehidupan sosial)

---

---

#### 4 Layanan psikolog

---

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dasar telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk bimbingan, seperti bimbingan fisik, bimbingan kerohanian dan mental, bimbingan sosial dan psikososial, serta layanan psikolog. Ragam layanan tersebut memperlihatkan bahwa rehabilitasi sosial di UPT PPDD tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek mental, sosial, dan psikologis penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya ditemukan bahwasannya terdapat Sarana dan Prasarana yang Kurang diantaranya pada Ruang praktik tata boga dan peralatannya, Alat/mesin untuk praktik keterampilan menjahit, Unit komputer untuk keterampilan computer dan Mobil operasional ramah disabilitas. Di sisi lain hal menunjukkan masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terutama fasilitas praktik keterampilan dan mobilitas ramah disabilitas. Keterbatasan ini penting diperhatikan karena rehabilitasi sosial dasar yang bertujuan meningkatkan kemandirian penerima manfaat membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai, khususnya dalam kegiatan pelatihan keterampilan.

Berdasarkan penelusuran dari beberapa kajian terdahulu ditemukan gap penelitian bahwa sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan evaluatif kuantitatif yang fokus pada indikator keberhasilan program, seperti jumlah peserta, anggaran, atau tingkat pencapaian kegiatan. Padahal, pendekatan kualitatif sangat penting untuk memahami bagaimana proses rehabilitasi sosial dijalankan, bagaimana hubungan antara petugas sosial dan penerima manfaat terbentuk, serta bagaimana penyandang disabilitas memaknai pelayanan yang mereka terima. Keterbatasan penelitian sebelumnya juga terlihat dari minimnya kajian yang secara khusus membahas rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di lingkungan UPT Dinas Sosial Provinsi Riau. Penelitian yang ada di Provinsi Riau lebih banyak membahas pelayanan rehabilitasi bagi penyandang eks psikotik terlantar dan belum secara spesifik mengkaji efektivitas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa. Padahal, setiap jenis disabilitas memiliki karakteristik kebutuhan rehabilitasi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan pelayanan yang berbeda pula. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas daksa terlantar di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau. Fokus penelitian diarahkan pada proses pelaksanaan rehabilitasi sosial, bentuk pelayanan yang diberikan, faktor pendukung dan penghambat program, serta pengalaman penerima manfaat dalam mengikuti rehabilitasi sosial.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif (Waruwu, 2023) yang berfokus pada satu kasus institusional, yaitu pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

---

Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks, proses, dan dinamika program rehabilitasi sosial dalam setting spesifik, termasuk interaksi antara kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat. Studi kasus juga relevan untuk mengkaji efektivitas program dari perspektif pengalaman dan makna yang dibangun oleh penyandang disabilitas terlantar, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang menekankan pemahaman mendalam (*thick description*) atas fenomena yang diteliti. Subjek atau partisipan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama: (1) penyandang disabilitas daksa yang berstatus atau pernah berstatus terlantar dan mengikuti program rehabilitasi sosial dasar di UPT; (2) petugas/pekerja sosial, instruktur, dan pengelola UPT; serta (3) pihak terkait lainnya seperti keluarga, relawan, atau mitra lembaga. Kriteria inklusi untuk penyandang disabilitas terlantar meliputi: telah mengikuti program minimal selama tiga bulan, bersedia diwawancarai, dan mampu berkomunikasi secara verbal atau melalui pendamping. Untuk petugas, kriteria meliputi: memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial di UPT dan terlibat langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan layanan.

Teknik penentuan informan utama menggunakan purposive sampling (Sugiyono, 2021), yaitu pemilihan partisipan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini banyak digunakan dalam studi kasus tentang pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang disabilitas untuk memastikan keterwakilan beragam pengalaman dan posisi dalam program. Selanjutnya, digunakan pula teknik snowball sampling apabila diperlukan, yakni meminta rekomendasi dari informan awal untuk mengidentifikasi partisipan lain yang dianggap memiliki pengalaman relevan (Alfansyur & Mariyani, 2020). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik utama: wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang dibangun oleh penyandang disabilitas terlantar dan petugas UPT tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan merujuk pada langkah-langkah umum yang dikembangkan dalam literatur penelitian kualitatif. Analisis tematik dipilih karena fleksibel dan cocok untuk mengidentifikasi pola makna (tema) dalam data kualitatif, terutama ketika fokus penelitian adalah menggali pengalaman, persepsi, dan proses sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau dilaksanakan melalui beberapa bentuk pelayanan utama, yaitu bimbingan fisik, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan sosial dan psikososial, serta pelatihan keterampilan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik penyandang disabilitas, tetapi juga

---

diarahkan pada peningkatan kepercayaan diri, kemampuan sosial, dan kemandirian penerima manfaat

### ***Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Daksa***

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT PPDD dilakukan secara terstruktur melalui kegiatan harian dan pendampingan sosial oleh pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan instruktur keterampilan. Berdasarkan hasil observasi, penerima manfaat mengikuti kegiatan senam fisik, pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta layanan konseling psikologis secara berkala. Program tersebut dirancang untuk membantu penyandang disabilitas terlantar agar mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya. Hasil wawancara dengan salah satu pekerja sosial menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, tetapi juga membangun motivasi hidup dan rasa percaya diri mereka.

*“Yang paling penting sebenarnya bukan hanya memberi bantuan, tetapi bagaimana mereka bisa kembali percaya diri dan merasa dihargai. Banyak dari mereka sebelumnya merasa tidak diterima di masyarakat.” (Informan Pekerja Sosial)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial memiliki dimensi psikososial yang sangat penting dalam pemulihan keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Hal ini juga terlihat dari perubahan perilaku beberapa penerima manfaat yang mulai aktif berinteraksi dan mengikuti kegiatan kelompok setelah menjalani rehabilitasi. Salah satu penerima manfaat mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti program rehabilitasi sosial, dirinya merasa malu dan bergantung sepenuhnya pada keluarga. Namun setelah mengikuti pembinaan keterampilan dan pendampingan sosial, ia mulai memiliki semangat untuk hidup mandiri.

*“Dulu saya jarang keluar rumah karena minder. Setelah ikut pelatihan di sini, saya jadi lebih percaya diri dan punya keinginan untuk bekerja.” (Penerima Manfaat)*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis dan sosial penerima manfaat, khususnya dalam meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi untuk mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dasar di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau telah berjalan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan keterampilan. Temuan ini sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial yang dikemukakan oleh Edi Sutrisno yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan keberfungsian sosial individu agar mampu menjalankan peran sosialnya secara wajar dalam masyarakat. Pendekatan rehabilitasi yang tidak hanya berorientasi pada bantuan fisik, tetapi juga pemberdayaan sosial dan psikologis, menunjukkan bahwa program rehabilitasi di UPT PPDD telah mengarah pada pendekatan kesejahteraan sosial yang lebih holistik. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar telah berjalan cukup efektif, namun belum optimal sepenuhnya. Efektivitas tersebut terlihat dari adanya pelaksanaan program rehabilitasi yang mencakup bimbingan fisik, mental spiritual, sosial psikososial, serta pelatihan keterampilan yang mampu membantu penerima

---

manfaat meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan sosial, dan motivasi untuk hidup mandiri.

Peningkatan rasa percaya diri dan motivasi hidup penerima manfaat menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pemulihan psikososial penyandang disabilitas terlantar. Temuan ini mendukung penelitian (Anggraeni et al., 2025) yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial mampu meningkatkan kemampuan adaptasi sosial dan keterampilan hidup penyandang disabilitas. Dalam konteks teori interaksi sosial, hubungan yang dekat antara pekerja sosial dan penerima manfaat memperlihatkan pentingnya pendekatan humanis dalam rehabilitasi sosial. Pendampingan yang dilakukan secara personal membantu penerima manfaat merasa dihargai dan diterima sebagai individu yang memiliki potensi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa rehabilitasi sosial bukan sekadar proses administratif pelayanan sosial, melainkan proses pemberdayaan yang membutuhkan empati, komunikasi, dan dukungan emosional secara berkelanjutan.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Rehabilitasi Sosial***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar di UPT PPDD, antara lain adanya dukungan pemerintah daerah, komitmen pekerja sosial, serta keterlibatan tenaga pendamping dan tenaga kesehatan dalam pelayanan rehabilitasi. Hubungan yang cukup dekat antara petugas dan penerima manfaat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana rehabilitasi yang lebih humanis. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas rehabilitasi sosial. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah tenaga pekerja sosial profesional dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat yang membutuhkan pendampingan intensif. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya fasilitas pelatihan keterampilan dan transportasi ramah disabilitas, turut memengaruhi kualitas pelayanan rehabilitasi.

Seorang instruktur keterampilan menyampaikan bahwa keterbatasan alat praktik sering menyebabkan proses pelatihan tidak berjalan maksimal.

*"Kami sebenarnya ingin pelatihannya lebih variatif, tetapi alat yang tersedia masih terbatas. Kadang peserta harus bergantian menggunakan alat praktik." (Instruktur Keterampilan)*

Selain faktor internal, stigma sosial masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi sosial. Beberapa penerima manfaat mengaku masih merasa khawatir akan sulit diterima di lingkungan masyarakat setelah menyelesaikan program rehabilitasi.

Dengan demikian efektivitas rehabilitasi sosial masih menghadapi berbagai hambatan struktural, terutama keterbatasan tenaga profesional dan sarana prasarana pendukung. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Paramesti & Yuliani, 2024) yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan program rehabilitasi sosial belum berjalan optimal di berbagai daerah. Dalam penelitian ini, keterbatasan alat praktik keterampilan dan

---

minimnya jumlah pekerja sosial menyebabkan proses pendampingan belum dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh penerima manfaat.

Selain faktor internal lembaga, stigma sosial masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga menjadi tantangan penting dalam proses rehabilitasi sosial. Stigma tersebut menyebabkan sebagian penerima manfaat merasa kurang percaya diri untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan di dalam institusi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial perlu diintegrasikan dengan edukasi publik mengenai hak-hak penyandang disabilitas agar tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat perspektif kesejahteraan sosial yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar objek bantuan sosial. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan rehabilitasi sosial berbasis kebutuhan individual lebih efektif dalam membantu penyandang disabilitas membangun kemandirian dan keberfungsian sosial. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pengelola UPT untuk meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial, khususnya melalui penambahan tenaga profesional, penguatan fasilitas keterampilan, dan pengembangan program pascarehabilitasi.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau telah berjalan cukup efektif dalam membantu pemulihan keberfungsian sosial penerima manfaat. Efektivitas tersebut terlihat melalui pelaksanaan layanan rehabilitasi yang mencakup bimbingan fisik, mental spiritual, sosial psikososial, serta pelatihan keterampilan yang mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan sosial, dan motivasi kemandirian penyandang disabilitas. Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan instruktur keterampilan turut membentuk lingkungan rehabilitasi yang lebih humanis dan mendukung proses pemberdayaan penerima manfaat. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial masih menghadapi beberapa hambatan, terutama keterbatasan tenaga profesional, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung pelatihan keterampilan, serta masih adanya stigma sosial masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh program internal lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sumber daya dan lingkungan sosial yang inklusif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep rehabilitasi sosial berbasis pemberdayaan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berkembang dan mandiri. Dari sisi praktis dan kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial melalui penguatan tenaga profesional, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta pengembangan program

---

pemberdayaan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas terlantar. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas program pascarehabilitasi dan melakukan studi komparatif pada berbagai lembaga rehabilitasi sosial agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

### DAFTAR RUJUKAN

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Alfarabbi, R. K., & Indarto, K. (2024). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Implementation Of A Social Rehabilitation Program In The Empowerment Of Persons With Disabilities By The Department Of Social And Community Empowerment Of The City Of Samarinda. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (Jika)*, 4(2), 55–64.
- Anggraeni, N., Murti, I., & Hartono, S. (2025). Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Upt RsbD Pasuruan. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(1), 208–220.
- Edi Sutrisno. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan. In *Jakarta: Prenadamedia Group*.
- Erlinawidyaningrum, S. (2019). Efektivitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dan Medis Bagi Penyandang Disabilitas Fisik (Daksa) Di Balai Rtpd Yogyakarta. Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Paramesti, W., & Yuliani, S. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(1), 118–134.
- Sari, I. P., & Museliza, V. (2023). Analisis Pelayanan Rehabilitasi Bagi Penyandang Eks Psikotik Terlantar Di Unit Pelaksana Teknis ( Upt ) Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 101–109.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana*, 7(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>